

**SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA:  
Memahami Sistem Komunikasi Dalam Budaya Pancasila**

**Drs.SAKHYAN ASMARA**

**Jurusan Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sumatera Utara**

**A. PENGANTAR.**

Sebuah sistem sangat diperlukan bagi melancarkan mekanisme sub-sub sistem yang ada didalamnya. Sistem sangat membantu dalam memudahkan pencapaian tujuan sistem juga membangun kesamaan-kesamaan dari keserasian.

Di Indonesia dikenal beberapa bangunan sistem, misalnya Sistem Hukum Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem Sosial Indonesia, Sistem Budaya Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia dan sistem-sistem nilai lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam proses interaksi antar orang di Indonesia.

Dalam kehidupan komunikasi juga mulai dikenal dengan istilah Sistem Komunikasi Indonesia. Sistem ini merupakan rumusan baru bagi Indonesia meskipun pelaksanaannya secara implisit telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terutama melalui norma Sistem Pers Indonesia. Namun rumusan yang jelas tentang Sistem Komunikasi Indonesia masih belum dimiliki.

Dengan merumuskan Sistem Komunikasi Indonesia maka kita akan memiliki sebuah bangunan sistem dalam berkomunikasi yang seragam dan menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sehingga dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa tidak mustahil sistem komunikasi yang dibangun di Indonesia melalui konsep Sistem Komunikasi Indonesia itu akan menjadi sebuah sistem yang perlu dicontoh oleh negara-negara lain yang karakteristiknya sedikit banyak mirip dengan negara Indonesia.

Bangunan dari sistem komunikasi Indonesia itu akan berlandaskan pada Pola Komunikasi yang dikembangkan di Indonesia dengan perangkat nilai dan perundangan yang ada. Sebab pola komunikasi didalam suatu negara akan menentukan bangunan sistem komunikasi yang akan dikembangkan di negara ini.

**B. POLA KOMUNIKASI .**

**1. Landasan Teoriis.**

Pola komunikasi didalam suatu negara selalu dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup bangsanya sekaligus memberikan bentuk bagi falsafah komunikasi yang dianut dalam proses interaksi antar orang yang terjadi dinegara itu. Falsafah komunikasi yang dianut. pada umumnya sejalan dengan sistem politik yang berlaku. Komunikasi mempunyai kemampuan menambah pengetahuan, merubah dan memperkuat opini, merubah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun menambah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun sosial. Keadaan ini mengharuskan adanya kesamaan pandangan antara supra dan infrastruktur politik dalam mengimplementasikan kegiatan komunikasi sesuai dengan filsafat bangsa itu sendiri.

Fred S. Seibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, mengajukan tipologi komunikasi khususnya komunikasi massa yang dikenal dengan istilah "Four Theories Of the Press" meliputi empat sistem yakni authoritarian libertarian, social responsibility dan communist - dalam hal ini Komunis Soviet. Sistem ini juga menjadi aliran didalam sistem pemerintahan yakni otoriter, liberal, tanggung jawab sosial dan komunis.

Bangunan filsafat komunikasi juga mengacu kepada kerangka empat sistem tersebut dimana harus terdapat kesamaan pelaksanaan sistem antara

sistem pemerintahan yang dianut dengan pelaksanaan sistem komunikasinya (Astrid, Filsafat Komunikasi, 1979).

## **2. Perkembangan dalam Era Reformasi di Indonesia.**

Bila melihat perkembangan politik di negara kita dewasa ini sebagai dampak dari adanya reformasi, telah muncul berbagai pergulatan pemikiran mengenai negara dalam rangka mencari format yang pas bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Beberapa diantaranya ialah adanya gagasan untuk membentuk negara federal, menguatnya tuntutan otonomi, adanya gugatan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas, otonomi, adanya gugatan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas, terbentuknya partai-partai politik yang kian hari kian bertambah, semakin maraknya unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat. Didalam dunia komunikasi juga terjadi perkembangan baru, antara lain dicabutnya Keputusan Menteri Penerangan tentang peraturan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sehingga pengurusan SIUPP menjadi lebih mudah, terbangunnya keberanian moral dalam menyampaikan aspirasi dan koreksi meskipun terkadang tidak sejalan dengan pemerintah, adanya toleransi yang tinggi dalam perbedaan pendapat, penggunaan media massa yang semakin berani dalam menyajikan fakta atau opini serta berbagai perkembangan lain yang pada akhirnya bermuara kepada suatu komitmen yakni bagaimana persatuan dan kesatuan tetap dapat dipelihara dalam dinamika yang sedang berkembang sekarang ini.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas maka nilai-nilai filsafati yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sangat penting artinya. Diklat ini akan memberikan pemikiran mengenai sistem komunikasi yang harus diimplementasikan didalam negara yang memiliki budaya politik Pancasila khususnya dalam membentuk pola yang tepat terhadap proses interaksi yang positif antara pemerintah dengan masyarakat-masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian akan diperoleh rumusan yang jelas dan tepat mengenai Sistem Komunikasi Indonesia.

## **C. PANCASILA DAN KOMUNIKASI**

### **1. Pancasila Sebagai Acuan Normatif Bangsa Indonesia.**

Indonesia sebagai suatu negara, sejak dikumandangkannya Proklamasi 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, telah meletakkan pandangan hidup bangsanya sebagaimana dapat dilihat dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

Dalam rumusan yang panjang tapi padat itu, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 memberikan penegasan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara dan dasar falsafah negara Indonesia. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dalam kalimat alinea ke-empat UUD 1945 sebagai berikut :

*....."Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia ".*

Pernyataan yang terkandung didalam alinea ke-empat UUD 1945 itu memberikan arti bahwa fungsi, tujuan dan bentuk negara Indonesia dilandaskan kepada makna filosofis yang terkandung di dalam kalimat sesudah kata-kata

"dengan berdasar kepada" tersebut, yaitu suatu rumusan yang akhirnya dikenal dengan PANCASILA, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila-sila dari lima sila ("panca sila") tersebut menjadi acuan normatif bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala bentuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang pada dasarnya mengatur kehidupan manusia Indonesia secara horizontal yakni bagaimana berhubungan dengan sesama Nilai yang terkandung didalam Pancasila itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah berurat akar sejak zaman nenek moyang. Kristalisasi nilai inilah yang menjadi dasar negara, jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan jiwa bangsa karena nilai yang terkandung didalamnya merupakan semangat yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Menjadi kepribadian bangsa memberikan arti bahwa Pancasila merupakan suatu ciri kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain sekaligus memberikan watak tertentu bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan dan berinteraksi antar sesama. Sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.

Pancasila diterima sebagai dasar negara, disamping sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila selalu harus menjadi landasan bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Hal ini memang telah diusahakan dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila kedalam peraturan perundangan yang berlaku. (P. Wahana, Filsafat Pancasila, 1996 Hal.65)

## **2. Pancasila Dalam Kehidupan Komunikasi**

Jika dikaitkan dengan komunikasi, nilai yang terkandung di dalam tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi. Sila pertama memberikan pengakuan secara khusus pada eksistensi bentuk komunikasi transendental yaitu sebagai manifestasi dari pengakuan bangsa Indonesia terhadap sesuatu yang gaib yang di pandang ikut menentukan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Sila kedua menuntut adanya komunikasi manusiawi dengan menerapkan etika komunikasi yang adil dan beradab, sila ketiga mengisyaratkan pelaksanaan norma-norma komunikasi organisasi, komunikasi politik termasuk komunikasi lintas budaya dan komunikasi tradisional yang bernuansa persatuan dan kesatuan, sila keempat memberikan tekanan pada pengakuan dilaksanakannya komunikasi dua arah dan timbal balik yang menghubungkan secara vertikal, horizontal maupun diagonal antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya yang berorientasi pada kesamaan dan kesepakatan baik keluar maupun kedalam dengan menggunakan model relational atau konvergensi. Akhirnya sila kelima mengandung makna implikasi komunikasi sosial, komunikasi bisnis maupun komunikasi administrasi dan management dengan berorientasi pada asas keseimbangan dan keserasian bertujuan agar terjadinya perubahan sosial yang lebih baik secara material maupun spiritual.

Bila dilihat Pancasila dalam perspektif komunikasi tersebut diatas maka segala tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan dan kegiatan komunikasi didalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya; haruslah dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan kata lain segala tingkah laku bangsa Indonesia harus dapat dikembalikan secara bulat dan utuh kepada Pancasila sebagai "State Fundamental Norm" bangsa Indonesia sehingga Pancasila bukan saja merupakan sumber

inspirasi bagi perjuangan melainkan juga sebagai suatu cita-cita yang harus dicapai.

#### **D. BUDAYA POLITIK DAN STABILITAS POLITIK DI INDONESIA.**

Kehidupan politik di Indonesia menghendaki adanya suatu sistem politik yang mengandung nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri yakni budaya politik Pancasila. Untuk melaksanakan budaya politik ini diperlukan suatu mekanisme pembangunan politik melalui pembaharuan struktur dan kultur kehidupan politik di Indonesia yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kearah tercapainya cita-cita nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan politik merupakan usaha pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan politik bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Mengingat corak ideologis dari pembangunan politik di Indonesia ini maka kita harus melandaskan sasaran, arah, kebijaksanaan, maupun program pelaksanaannya pada ideologi bangsa dan negara. Disamping itu demi efektifitas pelaksanaannya kita dapat secara selektif memanfaatkan pelbagai gagasan ataupun kerangka pemikiran tentang pembangunan politik yang pernah ataupun sedang berkembang di dunia sepanjang gagasan atau kerangka pikiran itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai "Ideologi Pancasila." (Amirmachmud, Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia, 1986, Hal. 5-6).

Pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia sejak kemerdekaannya mengalami berbagai tantangan baik pada masa orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno, masa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto maupun masa reformasi khususnya dalam masa transisi tahun 1998-1999 dibawah kepemimpinan BJ. Habibie.

##### **1. Masa Orde Lama**

Pada orde lama tidak menunjukkan stabilitas dalam bidang politik. Kesempatan yang tersedia bagi setiap kabinet untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pada umumnya berusia singkat karena pada waktu itu kabinet yang terbentuk selalu 'jatuh bangun'.

Kestabilan politik dapat diamati lebih terperinci dengan memperhatikan dimensi waktu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek kestabilan politik lebih banyak ditentukan oleh kewibawaan pemerintah. Bagaimana masyarakat dalam pengertian baik massa maupun group elite yang terlingkup kepada pendukung pemerintah dan yang beroposisi, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan programnya, amat berpengaruh terhadap kestabilan politik". (Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, 1981, Hal. 21).

Dengan kata lain singkatnya waktu yang dimiliki oleh suatu kabinet dalam mengemban tugas pemerintahan mencerminkan betapa stabilitas politik tidak dapat berjalan dengan baik. Mengemban tugas pemerintahan mencerminkan betapa stabilitas politik tidak dapat berjalan dengan baik.

Ketidakstabilan itu juga dapat dilihat dari adanya aksi protes yang dilakukan melalui demonstrasi, terjadi-nya huru hara (riot) serta bentuk-bentuk peristiwa kekerasan bersenjata. Berdasarkan indeks ketidakstabilan politik di Indonesia tahun 1948-1967 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**INDEKS KETIDAKSTABILAN POLITIK DI INDONESIA  
TAHUN 1948 -1967 \*)**

Tahun	Demonstrasi/Protes	Huru-Hara (Riot)	Kekerasan Bersenjata	Jumlah
1948	-	1,2	0,7	1,9
1949	-	-	0,7	0,7
1950	-	1,2	0,5	1,7
1951	-	25,6	0,3	25,8
1952	2,2	1,2	0,3	3,7
1953	2,2	1,2	0,7	2,9
1954	2,2	1,2	0,3	3,7
1955	-	-	88,7	88,7
1956	-	-	0,7	0,7
1957	2,2	1,2	0,5	3,9
1958	6,7	-	2,5	9,2
1959	-	1,2	0,8	2,0
1960	-	1,2	0,5	1,7
1961	-	-	0,2	0,2
1962	2,2	1,2	0,2	3,6
1963	-	24,4	-	24,4
1964	2,2	1,2	0,5	3,9
1965	6,7	13,5	0,8	21,0
1966	40,0	19,5	0,8	60,3
1967	33,4	6,2	0,3	39,9

\*) Dikutip dari Arbit Sanit, Drs., Sistem Politik Indonesia, 1981, Hal.23

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadinya peristiwa kerusuhan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik terjadi pada setiap tahun meskipun indeksnya menunjukkan angka yang berbeda.

Indeks kerusuhan politik yang paling menyolok justru terjadi disepuluh tahun 1965, 1966 dan 1967. Masa ini dikenal dengan masa peralihan dari orde lama ke masa orde baru yang ditandai dengan puncak kerusuhan pada tanggal 30 September 1965 atau disebut juga Gerakan 30 September (G 30 S PKI).

## **2. Masa Orde Baru**

Pada masa pemerintahan orde baru, selama 32 tahun Soeharto mampu mengendalikan jalannya pemerintahan secara langgeng. Dengan melakukan penyederhanaan partai dan memberikan pembatasan-pembatasan dalam proses penyalahan aspirasi politik serta menggunakan paksa pisik yang sedikit banyak bersifat sah, Soeharto mampu menjadi Presiden selama hampir 7 Pelita. Sementara yang berganti hanyalah jabatan Wakil Presiden dan anggota kabinet.

Gejolak politik memang terjadi secara sporadis namun selalu dapat dikendalikan dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Soeharto. Kesalahan besar Soeharto adalah tidak dimilikinya perspektif ekonomi yang kuat dan tidak mampu memisahkan upaya perbaikan ekonomi rakyat dengan kepentingan ekonomi keluarga dari orang-orang yang dekat dengannya. Keadaan ini mengakibatkan situasi ekonomi bangsa demikian terpuruk. Sangat banyak rakyat yang kesusahan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya akan tetapi disisi lain terdapat pula orang-orang yang sangat berlebihan kehidupan materinya. Kesejangan sosial semakin mencolok. Ketidakadilan dirasakan dimana-mana. Korupsi dan kolusi merajalela. Para pejabat negara banyak yang berlimpahan harta benda sementara rakyat menjadi kelaparan dan jelata. Akhirnya muncullah gelombang aksi dari rakyat khususnya para mahasiswa menuntut dilaksanakannya "reformasi" yakni turunnya Soeharto dari jabatan Presiden dan menuntut perbaikan-perbaikan dalam berbagai bidang terutama dibidang politik, ekonomi dan hukum.

Langgengnya kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun tidak bisa dilepaskan dan upayanya menciptakan keseragaman dalam berbagai bidang terutama dalam melihat pandangan hidup bangsa Indonesia. Orde baru diartikan sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen; meskipun dalam pelaksanaannya banyak pendapat mengatakan tidak seluruhnya benar. Namun keadaan itu telah memberikan andil besar bagi Indonesia dalam membangun sebuah iklim berbangsa yang dlikembangkan sebagai suatu kerangka motivasi dan aspirasi dalam menciptakan budaya politik Pancasila yakni budaya politik yang dikembangkan sebagai suatu kerangka orientasi nilai-nilai, keyakinan, sikap dan tindakan yang secara sadar berpijak pada Pancasila.

### **3. Masa Era Reformasi**

Dalam era reformasi kepemimpinan nasional dipegang oleh BJ.Habibie sebagai presiden setelah sebelumnya terjadi pernyataan sepihak (declare) dari Soeharto yang menyatakan berhenti dan jabatannya sebagai Presiden. Selanjutnya pada waktu itu soeharto menyatakan bahwa yang melaksanakan tugas sebagai presiden ialah Wakil Presiden yang ketika itu dijabat oleh BJ.Habibie sesuai dengan bunyi pasal 8 UUD 1945 sebagai berikut:

*"Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya ". (BAB III Pasal 8 UUD 1945).*

Peristiwa politik menegangkan yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 yakni tidak lebih dari 2 bulan 10 hari setelah Pelantikan Presiden hasil Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR Tahun 1998, telah menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan politik di Indonesia sekaligus menandakan terkuburnya era rezim orde baru dan memunculkan era Indonesia baru yang disebut-sebut dengan "ERA REFORMASI".

Didalam era reformasi ini telah ditandai dengan berbagai perubahan dan perkembangan baik dalam kehidupan politik, sosial, hukum dan budaya. Independensi dan penegakan Hak Azasi manusia menjadi tuntutan fundamental sehingga proses penyaluran aspirasi rakyat menjadi lebih berani dan terbuka.

Mekanisme pemerintahan dituntut tranparansinya. Peran sosial politik ABRI diminta untuk dikurangi antara lain dengan mengurangi kursi ABRI di DPR, DPRD I dan DPRD II. Sejalan dengan itu tuntutan untuk mengikis habis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus didengarkan.

Setelah disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998, selanjutnya Habibie menyusun kabinetnya dengan melakukan perubahan-pembahan mendasar. Antara lain dibuangnya beberapa tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto termasuk putri sulungnya Ny.Siti Hardianti Indra Rukmana (Menteri Sosial). Kemudian Habibie memberikan jatah 3 kursi untuk Parpol yakni PPP dan PDI. Dari PPP diangkat Hamzah Haz (Sekarang Ketua Umum DPP PPP) sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Investasi dan Ketua BKPM, serta DR. AM Saefuddin sebagai Menteri Negara Urusan Pangan dan Holtikultura. Sedangkan dari PDI diangkat dr. Panangian Siregar sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kejutan lain yang dilakukan oleh Habibie ialah dengan mengangkat Ir. Akbar Tanjung (Sekarang Ketua Umum DPP Partai Golkar) sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Susunan kabinet sedikit banyak telah mencerminkan reformasi. Beberapa pejabat yang sebelumnya didepak dari posisinya seperti Koentoro, oleh Habibie diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Dan beberapa Menteri lain yang merupakan wajah baru dalam kabinet. Dalam hubungannya dengan kehidupan komunikasi Letjend. Yunus Yosfiah diangkat sebagai Menteri. Yunus Yosfiah dikenal sebagai tokoh pemberani, terbuka dan tidak suka bertele-tele. Ini dibuktikannya dengan melepaskan keterbatasan dalam pemberian SIUPP.

Hasilnya sekarang ini telah tumbuh sangat banyak penerbitan Surat Kabar, Tabloid maupun Majalah.

Pada sektor komunikasi non media, kegiatan aksi unjuk rasa semakin merajalela. Untuk itu Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengeluarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang kegiatan unjuk rasa. Sementara itu di beberapa tempat terjadi kerusuhan-kerusuhan massal dengan melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum maupun rumah-rumah pribadi. Beberapa daerah yang dapat dicatat mengalami peristiwa kerusuhan massal antara lain Aceh, Riau (Bagan Siapi-api), Jakarta, Jawa Timur (Banyuwangi), NTT (Kupang), Maluku (Ambon), Kalimantan Barat (Pontianak) dan beberapa daerah lain yang mengalami musibah kerusuhan massal.

Proses interaksi masyarakat di beberapa daerah memang terasa mencekam. Komunikasi menjadi kurang harmonis. Sikap prejudice makin merebak. Ancaman-ancaman terjadi kerusuhan baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi terus bergulir. Berbagai issue-issue menyebar luas. Saling menghujat antar tokoh-tokoh bangsa selalu muncul di media cetak maupun elektronik. Dalam keadaan yang demikian masyarakat mendambakan ketenangan dan ketenteraman, kesejukan yang dilandasi oleh nilai-nilai persahlan dan kesatuan.

Ketegangan hubungan antar orang diharapkan mencair. Sebuah sistem sangat dirindukan untuk menjadi obat bagi mencairkan ketegangan itu. Agaknya semakin demokratis suatu bangsa dan semakin meluasnya tuntutan reformasi justru semakin dirasakan perlunya suatu perangkat yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan tersebut. Pada saat inilah dirasakan perlunya bangunan Sistem Komunikasi Indonesia yang dapat diterima oleh semua lapisan dan golongan masyarakat di Indonesia.

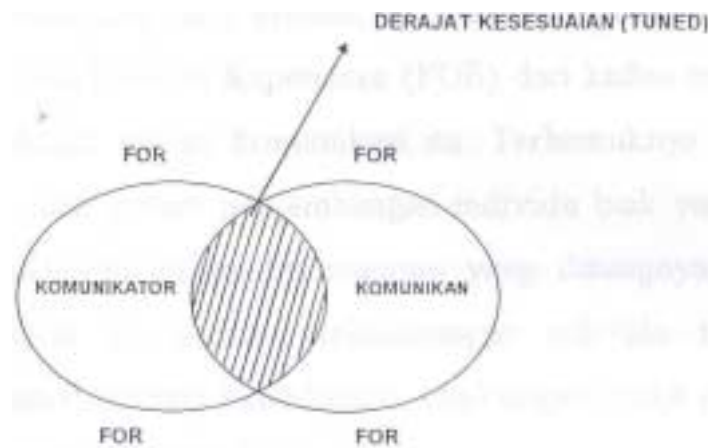
#### E. SISTEM KOMUNIKASI DALAM BUDAYA POLITIK PANCASILA.

Kegiatan komunikasi bertujuan untuk merubah tingkah laku orang lain atau setidak-tidaknya dapat menambah pengetahuan. Untuk melakukan kegiatan komunikasi yang efektif diperlukan beberapa syarat. Antara lain adalah terdapatnya kesamaan pengertian diantara pihak yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi itu.

##### 1. Kesesuaian (*In tuneness*)

Wilbur Schramm mengatakan bahwa dalam suatu proses komunikasi; pihak penerima pesan (receiver) dan pihak pengirim pesan (sender) harus berada dalam kesesuaian (in tune). (Schramm, dalam Onong U Effendy, Komunikasi Modernisasi, 1973, Hal 44).

Yang dimaksud dengan kesesuaian disini tidak lain adalah terjadinya kesamaan pengertian antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Bilamana hal ini digambarkan, maka dapat dilihat sebagai berikut:



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa komunikator berada dalam satu sisi sementara komunikan berada pada satu sisi lain. Kedua komponen ini disebut sebagai pillak pelaku komunikasi. Dari interaksi yang terjadi diantara kedua pihak yang berkomunikasi itu, sebahagian berada dalam situasi berimpit. Perimpitan inilah yang disebut dengan suasana kesesuaian (in tune). Makin besar perimpitan itu makin efektif komunikasi terjadi. Hanya saja suasana perimpitan dalam bentuk total (keseluruhan) adalah suatu yang tidak akan pernah terjadi, namun ketepatan yang lebih besar sangat mungkin terjadi karena dalam berbagai hal atribut yang dimiliki oleh pihak yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi ini bisa mengandung banyak persamaan.

## **2. Masalah Kultural**

Sesungguhnya untuk mencapai tingkat kesesuaian yang lebih besar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ini berkaitan dengan Frame of Reference (FOR) dan Field of Experience (FOE) dari kedua belah pihak yang terlibat di dalam proses komunikasi itu. Terbentuknya FOR dan FOE dipengaruhi oleh proses perkembangan individu baik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun yang datangnya dari luar dirinya. Oleh sebab itu proses perkembangan individu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kebudayaan, lingkungan sosial dan proses interaksinya dengan masyarakat luas.

Indonesia sebagai suatu negara yang dikenal memiliki kondisi masyarakat majemuk telah mampu menekan keberbedaan itu lewat konsep Pancasila. Namun hal ini bukan berarti menghilangkan eksistensi budaya yang telah berkembang berabad-abad lamanya di berbagai suku bangsa di Indonesia melainkan tetap dipelihara dan bahkan dipandang sebagai sub budaya yang melengkapi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Begitupun perbedaan suku, agama, ras maupun antar golongan tetap berpengaruh pada proses integrasi bangsa dan tentu saja keadaan ini mempengaruhi pada proses komunikasi sosial di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila belum sepenuhnya tersosialisasi pada masyarakat Indonesia. (Nasikun, Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia, 1974, Hal. 64).

Perbedaan latar belakang kultur memang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu objek yang ditafsirkan. Dalam proses komunikasi; objek yang menghubungkan pihak yang berkomunikasi adalah pesan. Penafsiran terhadap pesan dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan suatu pola tertentu agar dapat membentuk suatu gambaran yang sama terhadap suatu objek.

Realitas sosial yang mempunyai sistem dan tata nilai yang jelas merupakan salah satu tujuan kegiatan komunikasi sesuai dengan pandangan hidup yang mendasari filsafat suatu bangsa. Hal ini baru akan terjadi bila proses komunikasi yang terjadi memenuhi beberapa unsur untuk sampai kepada realitas sosial tertentu.

Realitas psikis manusia dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaannya yang tercermin dari ekspresi sikap dan tingkah lakunya. Suatu kebudayaan baik dalam bentuk material maupun nilai dimiliki oleh suatu komunitas sosial tertentu yang memberikan ciri identitas padanya, sehingga individu yang berada di dalam komunitas sosial itu memiliki identitas yang seragam walaupun mungkin intensitasnya berbeda-beda. Keadaan inilah pada gilirannya akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan timbullah keserasian bahkan lebih jauh dapat pula menciptakan stabilitas. Bilamana pranata komunikasi itu berlangsung di dalam kehidupan politik, maka stabilitas yang terjadi adalah stabilitas politik. Untuk sampai kepada tingkat stabilitas itu, relasi-relasi sosial antar warga yang ada di dalamnya haruslah memiliki kesadaran dalam berkomunikasi. Kesadaran dalam berkomunikasi diantara warga-warga suatu masyarakat, menyebabkan suatu masyarakat dapat dipertahankan sebagai suatu kesatuan. Karenanya pula dalam setiap masyarakat terbentuk apa yang dinamakan suatu sistem komunikasi. Sistem ini terdiri dari lambang-lambang

yang diberi arti dan karenanya mempunyai arti-arti khusus oleh setiap masyarakat. (Riyono Pratikto, Komunikasi Pembangunan, 1979, Hal. 38).

Kesadaran yang dimaksudkan ialah kesadaran melakukan komunikasi yang sesuai dengan norma dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat ini. Untuk suatu komunitas sosial yang berdasarkan Pancasila tentu saja norma dan tata nilai yang berlaku adalah yang terkandung di dalam jiwa Pancasila itu sendiri.

### **3. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekanan pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila akan memberikan identitas dan ciri tersendiri dan membedakannya dengan identitas atau ciri yang dimiliki oleh bangsa lain. Keadaan ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Konsekuensi logis dari keadaan ini menuntut agar dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia haruslah selalu berorientasi kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Termasuk di dalam aspek komunikasi.

Sistem komunikasi sebagai suatu sistem di dalam suatu bangsa, memiliki norma tersendiri sesuai dengan falsafah yang dibenarkan hidup di dalam bangsa itu. Sistem komunikasi didalam suatu negara lebih banyak disoroti dari hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya yang pesan-pesannya disampaikan melalui berbagai macam media. Media massa sering dipakai untuk menggalang hubungan itu karena dalam beberapa karakteristiknya media massa mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan saluran interpersonal tanpa memperhitungkan segi efek yang diharapkan dari hubungan yang terjadi itu. (Rogers & Shoemaker, 1971, Hal, 253).

Di dalam butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sudah terkandung suatu tata nilai yang merupakan penuntun sikap dari tingkah laku manusia Indonesia yang perlu diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh manusia Indonesia baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kemasyarakatan maupun kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas agaknya dapat disusun suatu pola yang standart tentang sistem komunikasi yang dianut oleh bangsa Indonesia serta legal dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menciptakan suasana keserasian diantara para pelaku komunikasi itu. Dengan demikian maka pola interaksi pemerintah dan masyarakat di dalam budaya politik Pancasila akan dapat pula ditentukan.

Pesan komunikasi bukanlah hanya terucapkan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, sikap, gerak, ungkapan air muka; pola tinggi rendahnya suara dan ucapan, penekanan kala-kala dan lain-lain, itu semua mengandung informasi. Lagi pula, kecuali apa yang orang dapat dengar melalui telinga kiri dan kanan, orang itu juga membuat kesimpulan dari gagasan atau perasaan yang disampaikan oleh orang lain.

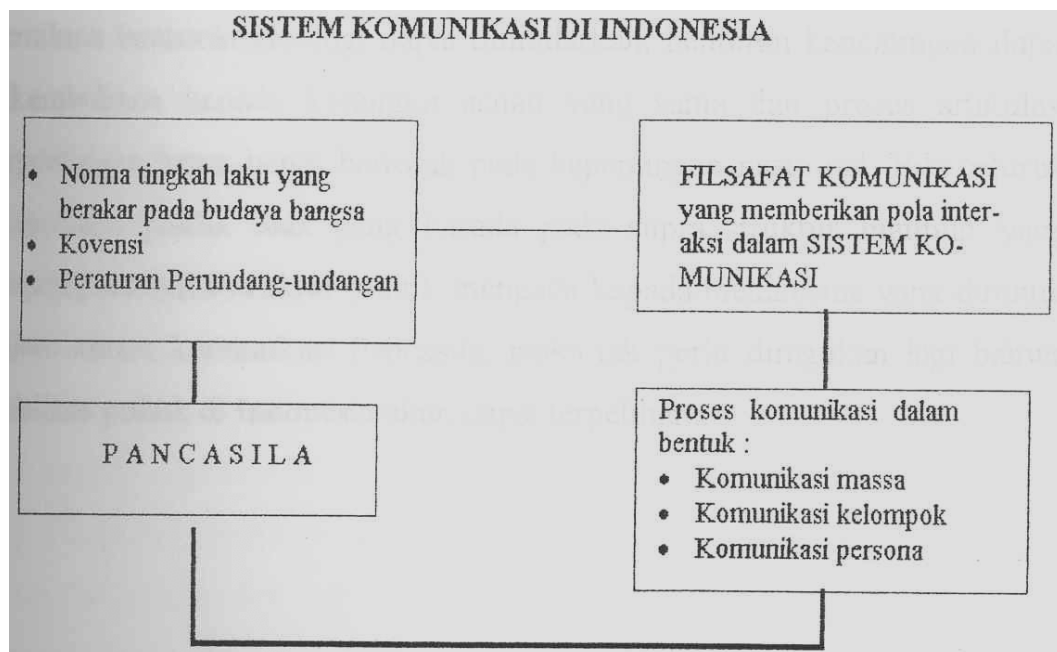
Suatu hubungan komunikatif akan selalu menggunakan telinga ketiga (Third Ear). Apabila hubungan semacam itu berjalan dengan baik maka akan menghasilkan semacam "Intuness" atau "keserasian". (K. Davis, 1979).

### **4. Pola Komunikasi di Indonesia**

Komunikasi yang dapat menciptakan suasana "in tuness" adalah komunikasi yang mampu membangun "personal contact" yaitu adanya sikap saling pengertian antara satu dengan lainnya. "Personal contact" terjadi manakala gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan dapat menggugah dan menggerakkan hati si penerima pesan, sehingga isi pesan informasi tersebut dapat dengan mudah atau bahkan langsung dihayati oleh si penerima dan kemudian diamalkannya.

Personal contact juga dapat meminimalkan sikap prejudice atau prasangka buruk. Prejudice biasanya timbul akibat terdapatnya banyak perbedaan. Prejudice itu merupakan salah satu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan proses komunikasi gagal total. Oleh karena itu dengan meletakkan sistem nilai yang sama sebagai tolok ukur dalam kegiatan komunikasi, maka timbulnya prejudice akan dapat dihilangkan. Suasana integrasi lebih banyak dapat diharapkan karena dengan sendirinya konflik nyata maupun latent secara perlahan dapat dihapuskan. Salah satu upaya menghindarkan konflik adalah dengan meletakkan nilai "musyawarah clan mufakat bulat." sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk interaksi termasuk di dalam kehidupan politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem Komunikasi di Indonesia meletakkan keyakinannya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai senjata yang sangat ampuh untuk menghindari terjadinya diskomunikasi diantara para pelaku komunikasi. Setiap proses komunikasi baik dalam bentuk komunikasi massa, komunikasi kelompok maupun komunikasi persona, harus mendasarkan diri pada pola interaksi yang berdasarkan kepada filsafat. komunikasi berpijak dari norma tingkah laku yang berdasar pada akar budaya bangsa Indonesia konvensi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara skematis hal itu dapat digambarkan sebagai berikut.:



Jika diaplikasikan secara optimal, skema diatas memberikan gambaran bagaimana cara penyusunan pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung di dalam budaya politik Pancasila. Para pelaku politik dalam supra struktur politik akan mengacu kepada nilai-nilai yang Pancasila di dalam proses kebijaksanaan maupun artikulasi kepentingan. Kebijakan dan ketatalaksanaan serta artikulasi kepentingan politik ditransformasikan kepada masyarakat sebagai infra struktur politik melalui pesan-pesan yang disusun sedemikian rupa. Dalam proses penyampaian pesan itu dapat dilakukan dengan mengeksploitir media massa, pertemuan-pertemuan berkelompok maupun secara interpersonal. Disini-lah dituntut kepada para pelaku komunikasi untuk menggunakan pesan yang tidak menimbulkan prejudice yakni pesan yang disusun dengan memperhatikan aspek norma baik secara sosiologis dan psikologis, aspek keserasian dan aspek norma tingkah laku yang menjadi tolok ukur dalam masyarakat yang Pancasila. Dengan demikian benturan ideologi dapat dihindarkan, benturan kepentingan dapat dikembalikan kepada kerangka acuan yang sama dan proses artikulasi kepentingan benar-benar bertolak pada kepentingan nasional. Bila seluruh

komponen politik baik yang berada pada supra struktur maupun yang berada pada infra struktur politik mengacu kepada mekanisme yang dituntut dalam sistem komunikasi Pancasila, maka tak perlu diragukan lagi bahwa stabilitas politik di Indonesia akan dapat terpelihara.

#### **F. POLA INTERAKSI DALAM BUDAYA POLITIK PANCASILA.**

Berangkat dari uraian di muka, agaknya pola interaksi di dalam sistem komunikasi yang berpangkal pada budaya politik Pancasila menaruh perhatian yang sangat mendasar pada beberapa aspek dan sekaligus memberikan ciri dan watak tertentu pada proses interaksi itu.

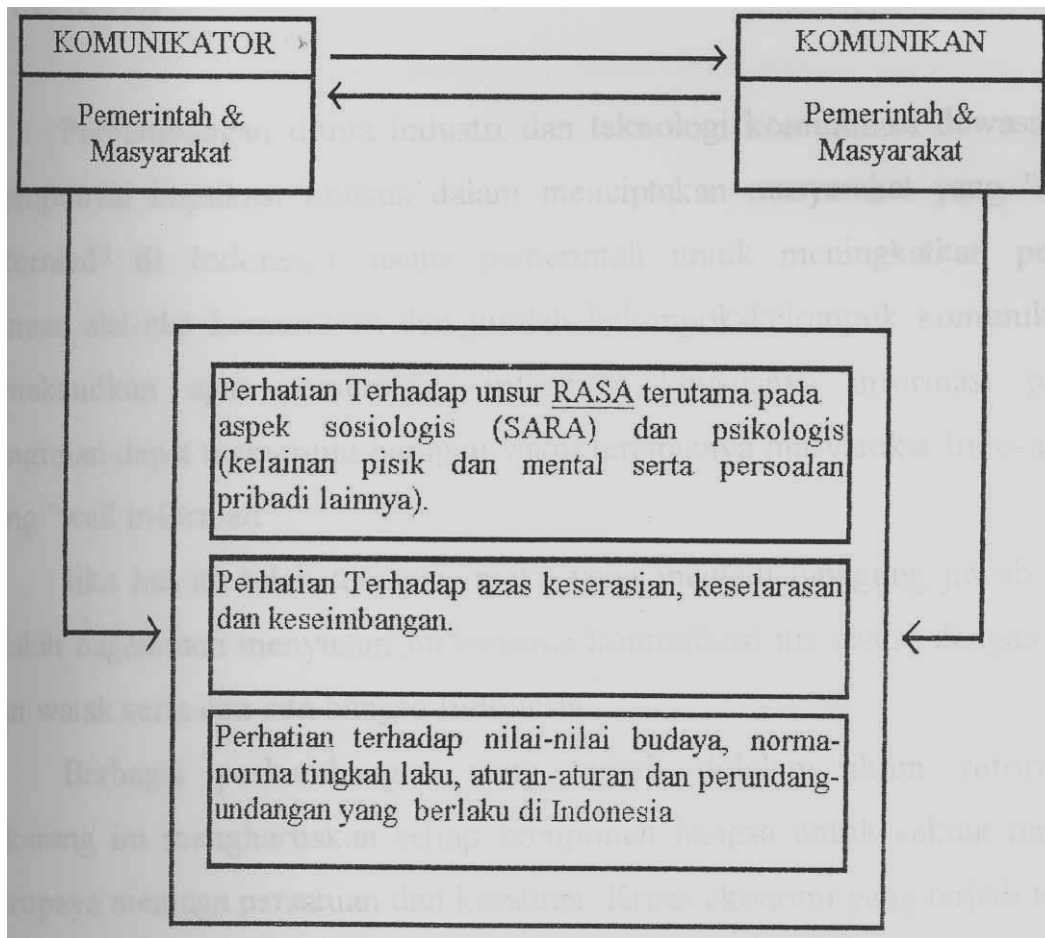
Diantara aspek penting yang paling dominan membentuk pola interaksi dalam budaya Politik Pancasila adalah perhatian terhadap unsur rasa baik secara sosiologis maupun psikologis. Kemudian perhatian terhadap asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dan akhirnya perhatian terhadap nilai-nilai budaya, norma tingkah laku, aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada aspek rasa; secara sosiologis interaksi yang terjadi senantiasa mempertimbangkan atribut yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam proses komunikasi, terutama yang menyangkut masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Sedangkan pada aspek rasa secara psikologis mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut ciri-ciri khusus dan watak yang dimiliki oleh pelaku komunikasi. Misalnya kelainan fisik, latar belakang pribadi yang berada di luar dari ukuran yang berlaku umum atau persoalan-persoalan pribadi yang dirasa tidak perlu diketahui oleh orang lain, tidak akan dicuatkan dalam kegiatan komunikasi. Hal ini tentu saja menyangkut kepada etika berkomunikasi baik proses penyampaian pesan yang dilakukan lewat media massa, proses komunikasi yang dilakukan dalam suatu kelompok bahkan mungkin dalam komunikasi yang dilakukan secara interpersonal.

Aspek yang memusatkan perhatian pada asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, mengacu kepada kesadaran individu dalam berkomunikasi. Ini menyangkut masalah motif, interest dan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku komunikasi. Proses komunikasi berlangsung secara damai dan nyaman serta menciptakan suasana yang saling menerima dan saling menguntungkan. Menghindarkan sejauh mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dan mampu mengeksplotasi-kan tingkat empathy yang semaksimal mungkin.

Perhatian terhadap nilai-nilai budaya, norma tingkah laku, aturan-aturan dan perundang-undangan, lebih ditujukan kepada usaha untuk tetap berada pada garis yang tidak bertentangan dari ukuran-ukuran ataupun pedoman-pedoman yang telah ditentukan.

Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga politik dan reaksi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijaksanaan politik, senantiasa mengacu kepada nilai-nilai budaya norma tingkah laku, aturan-aturan maupun perundang-undangan yang berlaku; baik yang menyangkut penyebaran informasi/gagasan, usaha persuasi maupun pembentukan opini. Secara skematis pola interaksi dalam budaya politik Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada skema diatas dapat dilihat bahwa sistem komunikasi di Indonesia mengenal proses komunikasi dua arah dimana interaksinya dapat terjadi antara pemerintah dengan pemerintah sendiri, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Kesemuanya itu mengacu kepada perhatian yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## 7. PENUTUP

Perkembangan dunia industri dan teknologi komunikasi dewasa ini mempunyai implikasi khusus dalam menciptakan masyarakat yang "well informed" di Indonesia usaha pemerintah untuk meningkatkan penggunaan alat-alat komunikasi dan jumlah kelompok-kelompok komunikasi, dimaksudkan agar pemerataan informasi khususnya informasi pembangunan dapat memenuhi harapan yakni terciptanya masyarakat Indonesia yang "well informed".

Jika hal itu telah tercapai, maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana menyusun mekanisme komunikasi itu sesuai dengan ciri dan watak serta cita-cita bangsa Indonesia.

Berbagai perkembangan yang terjadi didalam iklim reformasi sekarang ini mengharuskan setiap komponen bangsa untuk sekuat tenaga berupaya menjaga persatuan dan kesatuan. Krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak sangat luas bagi bangsa kita terutama dalam hal stabilitas. Untuk ini pemahaman setiap individu akan arti dari kesamaan pandang terhadap ideologi dan cita-cita bangsa sangat diperhatikan. Disinilah letak perlunya bangunan filsafat komunikasi untuk Indonesia yang lebih tepat kita sebut dengan Filsafat Komunikasi Pancasila. Hal ini bukan diwujudkan karena latar belakang historis dalam pembentukan filsafat komunikasi selalu bertolak dari kerangka pikiran dan pandangan hidup

suatu bangsa. Terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan politik dimana kegiatannya mempunyai peranan yang sangat ampuh untuk memelihara sistem politik yang dianut oleh suatu bangsa dan mempunyai peranan pada penciptaan stabilitas politik.

Dengan demikian negara kita akan mempunyai bangunan filsafat komunikasi tersendiri sejajar dengan filsafat-filsafat komunikasi yang sudah ada. Bagaimana cara menciptakannya terpulang kepada bangsa Indonesia yang berpandangan optimis.

#### BAHAN BACAAN

- Alfian, Dr., *Beberapa Masalah Pembangunan Politik di Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Amirmachmud, H., *Pembangunan Politik Negeri Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta 1986.
- Ashadi Siregar, Drs., *Etika Komunikasi dan Komunikasi Sosial*, Seksi Penerbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial & Politik UGM, Yogyakarta, 1985.
- Arbi Sanit, Drs., *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Astrid S. Susanto. Dr. Phil., *Filsafat Komunikasi*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.
- Bambang Setiawan, Drs., *Arti Penting Studi Jaringan Komunikasi di Indonesia*, Espogama, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 1980.
- Bibit Surapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Ghalia, Indonesia, 1985.
- Davis, K., dalam Handoko, *Komunikasi Sambung Rasa*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Ismid Hadad (Editor), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1979.
- Nasikun, Drs., *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Seksi Penerbitan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 1974.
- Onong Uchyana Effendy, Drs., *Komunikasi dan Modernisasi*, Saduran Himpunan Karya Carl I. Hovland, Charles Cooley, Wilbur Schramm, Bernard Betelson, Ithel De Sola Pool, Penerbit Alumni, Bandung, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- P. Wahana, Drs., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1996.
- Riyono Pratikno, Drs., *Komunikasi Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Rogers, Everett M. & F. Floyd Shoemaker, *Communication of Innovation*, Diterjemahkan oleh Drs. Abdillah Hanafi, dalam Memasyarakatkan Ide-ide Baru, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Samovar, Larry A, Cs., *Understanding Internasional Communication*, Ward worth Publishing Company, California, 1985.
- Samsuddin Abdul Rahim, *Empat Teori Akhbar*, diterjemahkan dari Four Theories' of The Press, oleh Fred S, Siebert., Theodore Peterson dan Wilbur Schramm Penerbit, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kualalumpur, 1984.
- Tribuana Said, MDS., *Budaya Politik Indonesia Dalam Demokrasi Pancasila*, Lemhanas, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI., Kertas Kerja Perseorangan, 1984.